

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS: WISATA KEBUN TEH NGLINGGO)

Iman Surya

Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman
Jalan. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda
Pos-el: imansuryaunmul@gmail.com

Sanny Nofrima

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Pos-el: sannynofrima21@gmail.com

Herdin Arie Saputra

Universitas Muhammadiyah Semarang
Jalan. Kedungmundu Raya No.18, Semarang
Pos-el: herdinarieaputra@gmail.com

Niken Nurmiyati

Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman
Jalan. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda
Pos-el: niken96unmul@gmail.com

Abstract: The concept of Collaborative Government as an alternative base is considered capable of realizing the acceleration and implementation of Tourism Areas. Collaborative Governance as a new paradigm used to face diverse issues in a complex society, a paradigm in which the principle of prnsip basically the existence of equality of relationships among stakeholders in the public, private and public sectors. It is also a process that involves various stakeholders who are related for the benefit or achieving a goal. This study analyzed Collaborative Governance in Sustainable Tourism Management, especially in Nglingsgo Tea Plantation Tourism Kulon Progo Regency. Then, this research uses qualitative research method. The research results of Nglingsgo Tea Plantation Tourism Kulon Progo Regency is one of the sources of income for local communities with the level of tourists visiting tourism to also increase people's income.

Keywords: Collaborative government, Sustainable; Tourism

Abstrak: Konsep Collaborative Government sebagai sebuah basis alternative dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi Kawasan Periwisataan. Collaborative Governance sebagai paradigma baru yang digunakan menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks, paradigma yang di maksud prnsip dasarnya adanya kesetaraan hubungan diantara pemangku kepentingan di sector public, swasta dan masyarakat. Hal ini juga sebuah proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk kepentingan atau mencapai sebuah tujuan. Penelitian ini menganalisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Khususnya di Wisata Kebun Teh Nglingsgo Kabupaten Kulon Progo. Kemudian, penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Wisata Kebun Teh Nglingsgo Kabupaten Kulon Progo salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan berkunjung ke periwisata hingga juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: Collaborative government, Berkelanjutan; Periwisata

Pendahuluan

Pembangunan pada sektor pariwisata pada saat ini menjadi pokok pembangunan, dimana pembangunan wisata ini menjadi konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan wisata dengan memerhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi pada jangka panjang¹. Hal ini guna untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika selain itu juga guna untuk menjaga keutuhan ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan. Selain itu pembangunan pada sector wisata juga guna untuk mengelola sumber daya alam di daerah. Oleh karenanya perlu adanya partisipasi antar sector baik pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan wisata². Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat, karena hal ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya³.

Kementerian Pariwisata menargetkan sebanyak 18 juta wisman pada 2019, sampai caturwulan pertama tercatat baru 5,12 juta orang. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebutkan bahwa total kunjungan wisman pada Januari–April 2019 mencapai 1,3 juta kunjungan per bulan⁴. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas kolaborasi antar sector dalam pengelolaan wisata berkelanjutan dalam

pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan pengelolaan destinasi wisata di Indonesia, dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak dan identifikasi pembangunan Kawasan pariwisata memiliki potensi untuk memajukan dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak dan kolaborasi dimulai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan dengan mampu berdaya saing dengan mempertahankan kearifan lokal. Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Kulonprogo.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pembinaan terhadap 11 desa wisata agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga diharapkan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar dan mengurangi pengangguran. Salah satu menjadi desa wisata nglingo. Dinas Pariwisata Kulon Progo secara intensif melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola, mulai dari pelatihan kuliner, pemandu wisata, pelayanan prima, hingga pengelolaan homestay dan melakukan pendampingan dalam menyusun paket wisata manajemen, promosi di media sosial memantu dalam promosi di berbagai

¹Mutaqin, A. Z. (2017). Pengembangan Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Tersedia pada: <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>

²Baiquni, M., Fandeli, C., & Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>

³Hamidah, N. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus

Objek Wisata Bukit Jamur Di Kecamatan Bungah Gresik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

⁴Jawapos.com. (2019). *Kejar Target 2019, Begini 4 Strategi Menteri Arief Gaet Wisman*. Tersedia pada: <https://www.jawapos.com/ekonomi/12/06/2019/kej-ar-target-2019-begini-4-strategi-menteri-arief-gaet-wisman/>

kesempatan⁵. Setiap daerah pada saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisatanya, seperti halnya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola wisata di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memiliki potensi wisata yang berkembang secara pesat dalam tata kelola pariwisata, dilihat dari jumlah pengunjung dimana pada tahun 2017 jumlah wisatawan di Kabupaten kulonprogo dapat mencapai 626.876 orang yang terbagi di beberapa obyek wisata seperti obyek wisata pantai glagah, waduk sermo, kalibiru, puncak suroloyo, goa kiskendo, kebun teh nglinggo dan obyek wisata lainnya di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo⁶. Dari jumlah wisatawan di Kabupaten Kulonprogo, wisatawan memiliki minat besar untuk mengunjungi obyek wisata kebun teh nglinggo dengan jumlah wisatawan mencapai sebanyak 52.436 orang. Data Kulonprogo dalam angka (2018) memberikan informasi jumlah wisatawan sebanyak 1.051.931 orang di tahun 2017 atau meningkat 49% dari sebelumnya. Data mengacu pada tempat wisata dikelola oleh Dinas Pariwisata⁷. Konsep Collaborative Government sebagai sebuah basis alternative dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi Kawasan Periwisataan. Collaborative Governance sebagai paradigma baru yang digunakan menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks, paradigma yang di maksud prinsip dasarnya adanya kesetaraan hubungan diantara pemangku

kepentingan di sector public, swasta dan masyarakat. Hal ini juga sebuah proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk kepentingan atau mencapai sebuah tujuan. Tulisan ini mencoba menganalisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Khususnya di Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat telah mengeluarkan sejumlah paket wisata untuk mendukung perkembangan kegiatan pariwisata itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi promosi, destinasi wisata, fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, produk wisata dan sumber daya manusia. Berkat adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, saat ini sudah terdapat berbagai objek wisata yang telah dikenal hingga keluar negeri dan objek wisata yang dalam proses promosi yang tentunya memiliki potensi dan daya tarik masing-masing.⁸ Pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi guna untuk perkembangan dalam kemajuan sector pariwisata di daerah, kondisi yang di lihat bahwa jumlah kunjungan yang menginap di hotel berkelas dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang drastis. Hingga pemberian otonomi kepada badan promosi pariwisata daerah mencapai dengan sesuai harapan dan mampu mengembangkan atau memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat setempat⁹. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Riau cukup

⁵Dispar Kulon Progo bina 11 desa wisata. (2019). *Antaraneews.Com*. Tersedia pada: <https://www.antaraneews.com/berita/1046106/dispar-kulon-progo-bina-11-desa-wisata>

⁶Republica.co.id. (2017). *Pengunjung Wisata Kulonprogo Capai 626.876 Orang*. Tersedia pada: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozpjc291-pengunjung-wisata-kulonprogo-capai-626876-orang>

⁷Nuringsih, K., MN, N., Pamungkas, A. S., & Amelinda, R. (2018). Pengembangan Wisata

Menoreh “Kebun Teh Nglinggo” di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Conference On Management and Behavioral Studies*, 332–343

⁸Sabatina, M. (2018). *Pesona Candi Sambisari Sebagai Obyek Wisata Di Yogyakarta*

⁹Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 6–12. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579>

baik, hal ini masih sangat terbilang minimnya program-program yang dijalankan secara kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setemoat, berdasarkan analisis indikator bahwa keberhasilan suatu pemerintah dan masyarakat yang memiliki masing-masing kepercayaan yang masih kurang, tanggung jawab atas kerja kemudian program yang dijalankan secara kerjasama, hal ini dapat menghambat kolaborasi dalam pemenuhan hak Pendidikan kaum difabel yang kurang kesadaran dari pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan¹⁰.

Pengembangan serta pengelolaan daerah wisata pada umumnya dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi ketika kebutuhan masyarakat akan pelayanan pariwisata semakin meningkat, hal tersebut tidak diimbangi oleh peran pemerintah. Justru hal yang terjadi adalah sebaliknya, peran pemerintah justru semakin terbatas. Oleh sebab itu diperlukan pihak-pihak yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari wisatawan¹¹. Kerjasama antar stakeholders yang bersifat saling bergantung untuk mencapai keputusan kolektif dalam mencapai tujuan bersama dimana setiap aktor yang berkolaborasi memiliki hubungan yang lebih dekat, komunikasi yang intensif, serta seringkali mengaburkan batas-batas organisasi. Untuk lebih memahami kolaborasi dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan dimensi-dimensi dan komponen-komponen yang menyusun sebuah kolaborasi¹².

Kemudian proses pembentukan kepercayaan antar setiap stakeholders merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang silid antar setiap aktor. Pembentukan kepercayaan bersama artinya terdapat rasa percaya di seluruh aktor kolaborasi dan membuktikan hubungan para aktor bisa diandalkan sehingga dapat membentuk sebuah hubungan yang saling menguntungkan.

Keberhasilan pengelolaan destinasi wisata religi sunan giri dan juga pengelolaan fasilitas penunjang oleh pihak yayasan pengelola¹³. Generasi Z yang melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Garut menginginkan adanya aplikasi online dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan wisata, maka peneliti mengusulkan selain dibuatnya account resmi Instagram tentang wisata Garut dibuatkan juga aplikasi mobile berisi tentang directory destinasi wisata Garut, jadwal event, atau pun tentang akses ke destinasi wisata tertentu di Kabupaten Garut untuk memudahkan itinerary kunjungan bagi para generasi Z¹⁴. Berdasarkan penelitian sebelumnya, analisis ini merupakan analisis yang telah banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya namun analisis ini mengambil perspektif Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan. Dimana analisis ini masih terbilang minim dengan itu penulis akan memaparkan terkait Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo Khususnya Wisata Kebun Teh Nglinggo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah suatu penelitian

¹⁰PitriT. Anisa. (2016). *Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau Tahun 2015-2016*. 4(June), 1–12

¹¹Mirza, R., Universitas, D., & Mada, G. (2017). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum Ilmu Sosial*, 44(1), 43–54. <https://doi.org/10.15294/fis.v44i1.9858>

¹²Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah

di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5, 1–13

¹³Leman, L. A. (2018). Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11

¹⁴Trihayuningtyas, E., Wulandari, W., Adriani, Y., & Sarasvati, S. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Dan Promosi Pariwisata Bagi Generasi Z Di Kabupaten Garut. *Tourism Scientific Journal*. <https://doi.org/10.32659/tsj.v4i1.46>

yang menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung atau mendeskripsikan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa secara kritis¹⁵. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa kata lisan ataupun tertulis.

Collaborative Governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumberdaya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangku kepentingan tersebut. Sumberdaya tersebut berada dan dimiliki para pemangku kepentingan¹⁶. Perspektif collaborative governance telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah daerah local karena adanya keterbatasan pemerintah local dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya dengan collaborative governance yang merupakan proses yang banyak melibatkan actor kebijakan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Collaborative Governance dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan atau isu tertentu dari pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah atau pun non pemerintah, hal ini dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah melibatkan masyarakat sipil dalam

perumusan dan dalam pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama¹⁷.

Desa wisata salah satu bentuk dari penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan, dengan pengembangan desa wisata diharapkan dengan terjadinya pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berkesinambunga. Oleh karena itu keberadaan desa wisata mampu menjadikan produk wisata yang lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya yang tanpa merusak alam sekitarnya¹⁸. Dalam urgensi sector pariwisata sebagai locus yang didasari pertimbangan sebagai dilematis otonomi daerah yang dimana apemerintaha daerah dapat berupaya menaikkan pendapatan asli daerah, sehingga menjadikan sector pariwisata sebagai leading sector dalam capaian peningkayan pendapatan asli daerah dan adanya perubahan perspektif pengelolaan pada sekroe pariwisata yang mengalami pengeseran mulai dari model pengelolaan pariwisata yang massal dengan banyak mengundang dan mengikutsertakan investor swasta bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, menjadi sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal, bahkan berdampak pada sosial, ekonomi serta

¹⁵Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke-3

¹⁶Tri Sambodo, G., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>

¹⁷Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48–62

¹⁸Baiquni, M., Fandeli, C., & Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>

lingkungan yang merugikan terutama bagi komunitas local¹⁹.

Pembahasan

Wisata yang berkelanjutan diwujudkan melalui perencanaan pengembangan wisata yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi kawasan tersebut, dengan adanya pengumpulan informasi secara menyeluruh tentang potensi sumber daya yang ada dan dukungan kawasan terhadap pengembangan ekowisata yang di dukung dengan fisik, fasilitas penunjang yang tersedia termasuk keterbukaan masyarakat dalam minikapin kedatangan pengunjung. Seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dalam kolaborasi yang dikembangkan baik dari pemerintah, NGO (Non Governmnet Organization), maupun swasta. Pengembangan potensi wisata Wisata Kebun Teh Nglingo Kabupaten KulonProgo dapat terlihat dari destinasi mencegah atau mengantisipasi terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat dengan melibatkan masyarakat local sehingga merasakan kesejahteraan dari program pengembangan periwisata yang mengabungkan aspek ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Implementasi dari ketiga aspek tersebut akan membentuk keberlanjutan destinasi wisata.

Keberhasilan sector periwisata khususnya di Wisata Kebun Teh Nglingo Kabupaten Kulon Progo, yang di tentukan oleh berbagai hal salah satunya regulasi, sumber daya manusia dan semua stakeholder yang terlibat baik secara langsung sebagai pelaku periwisata maupun masyarakat yang terlibat dari implementansi kebijakam yang terkait dengan pariwisata. Melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak wisata diharapkan aset publik ini dapat

dikembangkan lebih cepat, terdapat manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih nyaman dalam memanfaatkan. Sekalipun demikian pihak pengembang atau pengelola dapat memanfaatkan kawasan ini sebagai lahan bisnis untuk menutupi biaya pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam meningkatkan sector wisatawan sangat dibutuhkan promosi lewat media sosial. Teknologi berbasis media sosial 2.0 dapat mengubah cara manusia berpikir, inetraktif dan dinamis. Media sosial 2.0 memungkinkan seseorang mengetahui informasi di tempat jauh dengan waktu yang singkat tanpa harus bertatap muka dengan mitra bicaranya. Media sosial 2.0 menjadi pengantar bagi aktivitas dalam berkembang jejaring sosial, percakapan, pencarian informansi dengan berbagi konten didalamnya, selain itu media sosial 2.0 memiliki ciri sebagai instrument melalui pengalaman pengguna, partisipasi pengguna dan metadata, yang memiliki sifat utama seperti keterbukaan dan kebebasan²⁰. Media social telah banyak mengubah dunia, keberadaannya semakin tidak bias dipisahkan dari kehidupan manusia, berkat manfaat dan fungsi media social membuat kehidupan manusia lebih efektif.

Attractions (Atraksi / Daya Tarik)

Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki objek-objek wisata dengan potensi dan keunikan masing-masing. Kulonprogo juga memiliki kontribusi dalam pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberi kontribusi terbesar dalam mempercepat laju pembangunan dikembangkan kreativitas melalui ekonomi

¹⁹Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism)*. 77–84

²⁰Rahman Riski. (2016). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayu, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

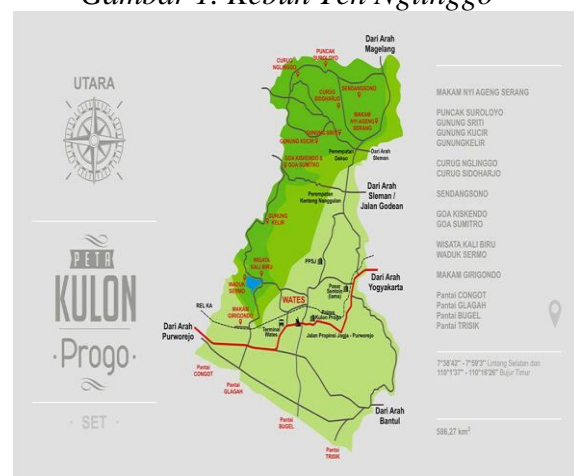
kreatif sehingga sector pariwisata sebagai salah satu potensi yang diberdayakan sebagai pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Wisata kebun teh nglinggo dikembangkan sebagai destinasi eco-wisata sehingga melalui model tersebut wisatawan dengan keindahan alam dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, dan strategi pengembangan destinasi harus menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sosial budaya sehingga berkelanjutan pembangunan daerah dapat berlanjut dan dapat di nikmati generasi ke generasi. Komplek perkebunan teh Nglinggo terletak di dataran tinggi yaitu sekitar 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Area tanam kebun teh ini memiliki luas sekitar 72 hektar.

Amenities (Fasilitas) dan Accessibilities (Aksesibilitas)

Fasilitas yang ada di Kebun Teh Nglinggo antara lain mushola, toilet, tempat parkir dan warung makanan-minuman ringan. Selain perkebunan teh, di sekitar lokasi ini juga terdapat hutan pinus dan perkebunan warga. Wisata nglinggo masih sangat alami di lokasi juga bisa dilakukan kegiatan petualangan dan perkemahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentunya pariwisata mempunyai perbedaan dalam karakteristik khususnya Wisata nglinggo.”



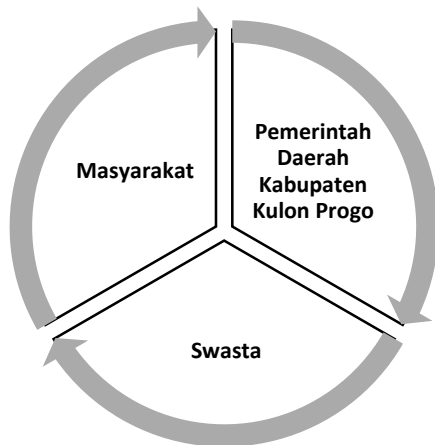
Gambar 1. Kebun Teh Nglinggo



Gambar 2. Peta Kulonprogo

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terpadu yang terorganisasi guna mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemelihara sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha pariwisata sehingga dapat meningkatkn melalui pengenalan kegiatan kreatif yang di peroduktif oleh sector pariwisata.” Pariwisata berkelanjutan guna mengundang semua pihak terutama masyarakat setempat untuk mengelolah sumber daya dengan cara memenuhi kebuthan ekonomi, sosial, dan estetika yang

memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam. Sehingga menciptakan kuantitas dan kualitas daya tarik pariwisata baik alam maupun budayanya. Memberdayakan lingkungan secara berkelanjutan dengan mewujudkan ketiga pilar governance tersebut yaitu:



Gambar 3. Tiga Pilar Governance

1. Peran Pemerintah

Dalam pandangan pemerintah yang disebutkan bahwa pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa wisata yang ditunjukkan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan kebijakan program pembangunan desa yang terpusat atau bersifat bantuan sesuai dengan kebutuhan desa. Perencanaan pembangunan desa dalam perencanaan pembangunan kawasan desa yang meresap secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan. Peran pemerintah mempermudah adatu memberi dukungan dana seperti dana alokasi desa atau dana pengembangan. Dukungan anggaran dan mempromosikan melalui web pemerintahan.

2. Peran Swasta

Dalam hal ini peran swasta pariwisata sebagai wadah pencarian warga sekitar dalam meningkatkan kerajinan, UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan mengembangkan hasil industri masyarakat yang memanfaatkan lingkungan pariwisata dalam menyediakan fasilitas pariwisata

Perkebunan teh Nglingga. Mempermudah akses transportasi.

3. Peran Masyarakat

Dalam hal ini peran masyarakat hendak dapat menjadi wadah dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan, masyarakat setempat dapat berkerjasama dalam wisata budaya dapat dilakukan mulai dari manajemen sampai pada pemasaran sehinggadapat mengurangi tingkat pengurangan agar melibatkan peran masyarakat dalam pengolahan pariwisata. Melalui kreativitas masyarakat guna, pendapatan masyarakat, pemberdayaan potensi pariwisata, kesejahteraan, memenuhi taraf hidup. Pembangunan di bidang kepariwisataan juga meningkatkan ekonomi masyarakat dan menguatkan kesadaran wisata untuk melastarkan pariwisata. Masyarakat setempat dapat mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam mengidentifikasi sumber daya yang dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan hingga pengelolaan daya Tarik wisata hingga masyarakat berpartisipasi dalam mengimplementasi strategi yang disusun sebelumnya.

Penutup Kesimpulan

Sesuai dengan paparan yang telah disampaikan di depan dan dilakukan analisis maka kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis adalah Pembangunan wisata berkelanjutan merupakan salah satu penerapan sustainable development goals guna untuk menciptakan pariwisata yang ramah dengan lingkungan hingga dapat di manfaatkan oleh masyarakat setempat local dalam mengurangi tingkat pengurangan wisata. Wisata Kebun Teh Nglingga Kabupaten Kulon Progo salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan berkunjung ke pariwisata hingga juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rekomendasi

Dalam meningkatkan sector wisatawan, di butuhkan publikasi dalam media sosial daya tarik media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sekarang. Media sosial bagaikan teknologi informasi yang cepat dan akurat guna meningkatkan daya tarik pengunjung sehingga menaikkan wisatawan dan dapat berdaya saing wisata yang lain, mengingat pariwisata indonesai terbilang daya saingnya sangat ketat, sehingga dapat mempengaruhi sector keberlanjutan wisata. Seperti melaksanakan pelatihan manajemen desa wisata dalam promosi wisata dan dapat dilihat oleh wisatawan yang akan berkunjung ke wisata the Kulon progo.

Pustaka Acuan

- Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 6–12. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579>
- Baiquni, M., Fandeli, C., & Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dispar Kulon Progo bina 11 desa wisata. (2019). *Antarnews.Com*. Retrieved from <https://www.antarnews.com/berita/1046106/dispar-kulon-progo-bina-11-desa-wisata>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5, 1–13.
- Hamidah, N. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur Di Kecamatan Bungah Gresik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jawapos.com. (2019). *Kejar Target 2019, Begini 4 Strategi Menteri Arief Gaet Wisman*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/ekonomi/12/06/2019/kejar-target-2019-begini-4-strategi-menteri-arief-gaet-wisman/>
- Leman, L. A. (2018). Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11.
- Mirza, R., Universitas, D., & Mada, G. (2017). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum Ilmu Sosial*, 44(1), 43–54. <https://doi.org/10.15294/fis.v44i1.9858>
- Mutaqin, A. Z. (n.d.). Pengembangan Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Retrieved from <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48–62.
- Nuringsih, K., MN, N., Pamungkas, A. S.,

- & Amelinda, R. (2018). Pengembangan Wisata Menoreh “Kebun Teh Nglinggo” di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Conference On Management and Behavioral Studies*, 332–343.
- Pitri T. Anisa. (2016). *Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau Tahun 2015-2016*. 4(June), 1–12.
- Rahman Riski. (2016). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Republica.co.id. (2017). *Pengunjung Wisata Kulonprogo Capai 626.876 Orang*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozpjzc291-pengunjung-wisata-kulonprogo-capai-626876-orang>
- Sabatina, M. (2018). *Pesona Candi Sambisari Sebagai Obyek Wisata Di Yogyakarta*.
repository.stipram.ac.id
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke-3
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism)*. 77–84.
- Tri Sambodo, G., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1).
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>
- Trihayuningtyas, E., Wulandari, W., Adriani, Y., & Sarasvati, S. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Dan Promosi Pariwisata Bagi Generasi Z Di Kabupaten Garut. *Tourism Scientific Journal*.
<https://doi.org/10.32659/tsj.v4i1.46>